

## I. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian Indonesia sektor pertanian secara tradisional dikenal sebagai sektor penting karena berperan antara lain sebagai sumber utama pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Peranan sektor ini di Indonesia masih dapat ditingkatkan lagi apabila dikelola dengan baik, mengingat semakin langkanya atau menurunnya mutu sumberdaya alam, seperti minyak bumi/petrokimia, dan air serta lingkungan secara global, sementara di Indonesia sumber-sumber ini belum tergarap secara optimal. Ke masa depan sektor ini akan terus menjadi sektor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, dan penerimaan ekspor serta berperan sebagai produsen bahan baku untuk penciptaan nilai tambah di sektor industri dan jasa.

Dalam Rencana Pembangunan Nasional, pemerintah telah menyusun strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan dan memelihara pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pemberantasan kemiskinan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama untuk mencapai tujuan ini, mengingat masih banyaknya sumberdaya alam pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan bahkan belum dimanfaatkan sama sekali. Di fihak lain, penduduk yang berpenghasilan di bawah US\$ 1,0 per hari masih berjumlah jutaan orang, apalagi yang belum memperoleh pekerjaan.

Pada sektor pertanian, subsektor perkebunan diharapkan tetap memainkan peran penting melalui kontribusinya dalam PDB, penerimaan ekspor, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah di luar Jawa. Sub-sektor perkebunan sebagai bagian integral dari sektor pertanian, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (i) ditinjau dari cakupan komoditasnya, meliputi sekitar 145 jenis tanaman berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim, sehingga pengembangannya akan dapat menjangkau berbagai tipe sumberdaya; (ii) ditinjau dari hasil produksinya, merupakan bahan baku industri atau ekspor, sehingga pada dasarnya

telah melekat adanya kebutuhan keterkaitan kegiatan usaha dengan berbagai sektor dan sub-sektor lainnya, dan (iii) ditinjau dari pengusahanya, sekitar 85% merupakan usaha perkebunan rakyat yang tersebar di berbagai daerah.

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi subsektor perkebunan. Pengembangan kelapa sawit antara lain memberi manfaat dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat (petani kelapa sawit dapat memiliki pendapatan sekitar Rp. 2 juta-Rp. 6 juta per tahun); produksi yang menjadi bahan baku industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan untuk ekspor sebagai penghasil devisa (produksi tahun 1998 sebesar 5,6 juta ton meningkat menjadi sekitar 10,7 juta ton pada tahun 2003); ekspor CPO yang menghasilkan devisa (volume ekspor tahun 1998 sebesar 1,6 juta ton senilai US\$ 800 ribu dolar meningkat menjadi 5,7 juta ton senilai US\$ 2,1 juta dolar pada tahun 2003); menyediakan kesempatan kerja bagi lebih dari 2 juta tenaga kerja di berbagai sub sistem. Dari sisi upaya pelestarian lingkungan hidup, tanaman kelapa sawit yang merupakan tanaman tahunan berbentuk pohon (*tree crops*) dapat berperan dalam penyerapan efek gas rumah kaca seperti (CO<sub>2</sub>), dan mampu menghasilkan O<sub>2</sub> atau jasa lingkungan lainnya seperti konservasi *biodiversity* atau eko-wisata. Selain itu tanaman kelapa sawit juga menjadi sumber pangan dan gizi utama dalam menu penduduk negeri, sehingga kelangkaannya di pasar domestik berpengaruh sangat nyata dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan tanaman dan agribisnis kelapa sawit akan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat di atas, apabila para pelaku agribisnis kelapa sawit, perbankan, lembaga penelitian dan pengembangan serta sarana dan prasarana ekonomi lainnya oleh berbagai instansi terkait memberikan dukungan dan peran aktifnya.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang prospek dan arah pembangunan kelapa sawit di Indonesia. Dokumen praktis ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, berkiprah, berusaha dan peduli dalam pengembangan agribisnis kelapa sawit di Indonesia seperti petani, perusahaan swasta, perusahaan negara, dan pemerintah.

## II. KONDISI AGRIBISNIS KELAPA SAWIT SAAT INI

### A. Profil Perkebunan Kelapa Sawit

Melalui berbagai upaya pengembangan, baik yang dilakukan oleh perkebunan besar, proyek-proyek pembangunan maupun swadaya masyarakat, perkebunan kelapa sawit telah berkembang sangat pesat. Pada tahun 1968, luas areal yang baru 120 ribu ha menjadi 4.926 ribu ha pada tahun 2003. Selain dari pertumbuhan areal yang cukup besar tersebut, hal lain yang lebih mendasar lagi adalah penyebarannya, yang semula hanya ada pada 3 propinsi saja di Sumatera, tetapi saat ini telah tersebar di 17 propinsi di Indonesia. Sumatera masih memiliki areal terluas di Indonesia, yaitu mencapai 75,98% diikuti Kalimantan dan Sulawesi, masing-masing 20,53% dan 2,81%. Komposisi perusahaan kelapa sawit juga mengalami perubahan, yaitu dari sebelumnya hanya perkebunan besar, tetapi saat ini telah mencakup perkebunan rakyat dan perkebunan swasta. Pada tahun 2003, luas areal perkebunan rakyat mencapai 1.827 ribu ha (34,9%), perkebunan negara seluas 645 ribu ha (12,3%), dan perkebunan besar swasta seluas 2.765 ribu ha (52,8%). Sumatera mendominasi ketiga jenis perusahaan, sedangkan Kalimantan dan Sulawesi menjadi lokasi pengembangan perkebunan swasta dan perkebunan rakyat.

Sejalan dengan perkembangan areal, produksi kelapa sawit juga mengalami peningkatan, dari hanya 181 ribu ton CPO pada tahun 1968 menjadi 9,8 juta ton pada tahun 2003 (Lampiran 1), dengan komposisi Perkebunan rakyat (PR) memberi andil produksi CPO sebesar 3.645 ribu ton (37,12%), perkebunan besar negara (PBN) sebesar 1.543 ribu ton (15,7 %), dan perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 4.627 ribu ton (47,13%). Produksi tersebut dicapai pada tingkat produktivitas PR sekitar 2,73 ton CPO/ha atau setara 13,65 ton TBS (tandan buah segar)/ha, PBN 3,14 ton CPO/ha atau setara 15,70 ton TBS/ha dan PBS 2,58 ton CPO/ha atau sekitar 12,90 ton TBS/ha. Produksi tersebut akan terus meningkat di masa datang, yang berasal dari tanaman belum menghasilkan (TBM) saat ini, dan dari pengoptimalan tanaman menghasilkan (TM) yang telah ada. Perkebunan kelapa sawit juga

telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia dengan perbandingan 85,55% Sumatera, 11,45% Kalimantan, 2%, Sulawesi, dan 1% wilayah lainnya. Produktivitas perkebunan kelapa sawit di Sumatera relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di Kalimantan dan Sulawesi. Di samping CPO, perkebunan kelapa sawit juga menghasilkan minyak inti sawit yang pada tahun 2003 mencapai tidak kurang dari 2,1 juta ton (Lampiran 2).

Hal lain yang perlu dicatat adalah produksi TBS bulanan tidak rata sepanjang tahun, tetapi memiliki pola tertentu. Panen puncak umumnya berlangsung selama 2-3 bulan dengan produksi sekitar 12-13% dari produksi tahunan sedangkan panen produksi rendah dapat mencapai sekitar 3-4% produksi tahunan. Distribusi produksi bulanan dapat bervariasi menurut lokasi dan distribusi bulanan ini penting untuk mengestimasi produksi bulanan dan semesteran. Contoh distribusi produksi diambil kasus di Kalimantan Barat, Aceh Timur dan Labuhan Batu (Lampiran 3).

## B. Profil Usaha Perbenihan

Saat ini sumber benih kelapa sawit tergabung dalam Forum Komunikasi Produsen Benih Kelapa Sawit. Forum ini beranggotakan enam produsen benih kelapa sawit, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), PT. Socfin, PT. Lonsum, PT. Dami Mas, PT. Tunggal Yunus, dan PT. Bina Sawit Makmur. Kapasitas produksi benih nasional adalah 124 juta per tahun yang berasal dari masing-masing produsen benih di atas secara berurutan sebesar 35 juta, 25 juta, 15 juta, 12 juta, 12 juta, dan 25 juta kecambah. Ke enam produsen benih tersebut pada dasarnya mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhan benih nasional, walaupun harus meningkatkan kapasitas produksi.

Pada beberapa tahun terakhir, produsen benih dihadapkan pada masalah beredarnya benih palsu. Namun, pemerintah bersama produsen benih telah melakukan langkah-langkah sistematis dan strategis untuk mengatasi masalah ini, yaitu:

1. Penegakan hukum pelaksanaan Undang Undang No. 12 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995, tentang perbenihan,

2. Peningkatan Pengawasan Peredaran dan Pengendalian Mutu Benih melalui penugasan kepada Dinas Perkebunan,
3. Peningkatan aktivitas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (BP2MB) dan aparat pemerintah di bidang perbenihan dengan melakukan kontrol yang lebih ketat jalur pengiriman udara/darat dan kunjungan ke pembibitan kelapa sawit di sentra-sentra kelapa sawit,
4. Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penyidikan pemalsuan benih, pelanggaran peredaran benih, dan penegakan pemberian sanksi/hukuman,
5. Sosialisasi oleh para produsen benih kelapa sawit kepada para pengusaha dan calon pengusaha perkebunan/masyarakat luas tentang benih kelapa sawit palsu/illegal,
6. Informasi yang akurat berkenaan dengan rencana perluasan areal tanam per tahun, rencana penanaman ulang (replanting) per tahun dan kebutuhan benih kepada penyandang dana pembangunan perkebunan (misalnya pihak perbankan),
7. Penyempurnaan Forum Komunikasi Produsen Benih Kelapa Sawit yang beranggotakan 6 produsen benih kelapa sawit. Melalui Forum ini seluruh ketersediaan benih kelapa sawit nasional dapat diupayakan untuk dipenuhi, dan
8. Impor benih dapat dilakukan jika kapasitas produksi produsen benih nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional. Namun demikian impor benih kelapa sawit perlu diwaspadai karena benih impor mempunyai resiko penularan/pembawa penyakit yang bersifat *soil born dan air born*, misalnya: layu *fusarium*, *bud rot*, *red ring disease*, dan lainnya.

## C. Profil Industri Pengolahan Kelapa Sawit

### 1. Industri pengolahan CPO

Industri pengolahan kelapa sawit yang mengolah tandan buah segar menjadi CPO terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan luas areal dan produksi. Hingga saat ini, jumlah unit pengolahan di seluruh Indonesia mencapai 320 unit dengan kapasitas olah 13,520 ton TBS per jam (Lampiran 4).

## 2. Pabrik pengolahan lanjut

Industri hilir kelapa sawit kategori produk pangan yang umum diusahakan di Indonesia berupa minyak goreng, sedangkan produk bukan pangan berupa oleokimia meliputi *fatty acid*, *fatty alcohol*, *stearin*, *glycerin* dan *metallic soap*. Industri minyak goreng dan oleokimia berkembang di beberapa daerah, yang umumnya di kota-kota besar yang lengkap dengan fasilitas pelabuhan. Beberapa daerah sentra industri minyak goreng meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Irian Jaya.

Untuk keperluan pangan, CPO dipisahkan menjadi fraksi padat (*stearin*) dan fraksi cair (*olein*). Olein sudah dapat dikelompokkan sebagai minyak goreng. Kapasitas terpasang industri fraksinasi 1985 adalah 2,9 juta ton padahal produksi CPO tahun tersebut adalah 1,2 juta ton. Pada 1995, kapasitas pabrik fraksinasi adalah 6 juta ton yang juga melebihi produksi CPO nasional dan pada tahun 2000, kapasitas terpasang mencapai 11 juta ton (Lampiran 5).

Dari segi laju pertumbuhan, industri oleokimia dasar yaitu *fatty acid*, *metallic soap*, *glycerine* dan *fatty alcohol*, maju sangat pesat. Pada 1988 produksi oleokimia dasar Indonesia baru 79.500 ton, naik menjadi 217.700 ton pada 1993, dan menjadi 652 ribu ton pada 1998 atau tumbuh dengan laju sekitar 23,5%/tahun. Namun, hingga tahun 2000 kontribusi oleokimia dasar Indonesia terhadap produksi dunia baru 10,8% (Lampiran 6). Jumlah pabrik oleokimia di seluruh Indonesia saat ini sekitar 27 unit, tersebar di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Irian Jaya.

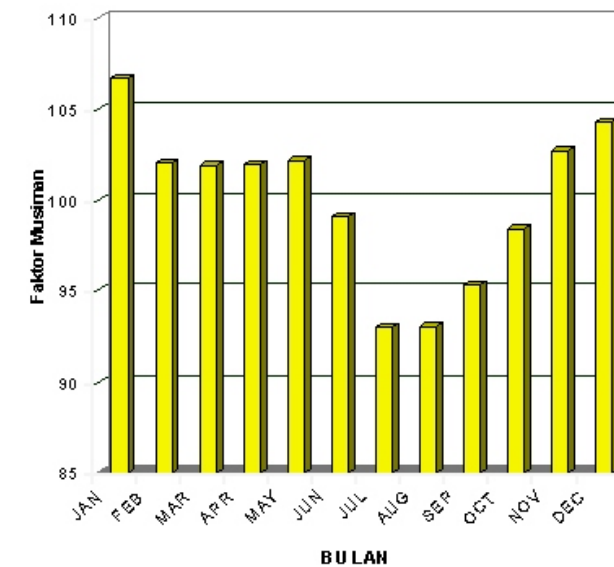
Yang juga menarik untuk diperhatikan adalah perkembangan industri oleokimia dasar merangsang pertumbuhan industri barang konsumen seperti deterjen, sabun, dan kosmetika. Dalam sepuluh tahun terakhir, pemakaian minyak sawit dalam industri oleokimia naik dengan laju sekitar 9%/tahun.

## D. Perdagangan dan Harga

### 1. Ekspor dan harga

Indonesia adalah negara *net-exporter* minyak sawit, tetapi dalam keadaan mendesak Indonesia juga mengimpor minyak sawit. Negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia adalah Eropa Barat, India, Pakistan, Cina, dan Jepang. Produk yang diekspor adalah minyak olahan tahap awal seperti RBD *palm oil*, CPO, dan beberapa produk oleokimia. Secara umum, ekspor minyak sawit Indonesia 1988-2000 meningkat dengan laju 13,5%/tahun (Lampiran 7).

Impor minyak sawit umumnya dalam bentuk olein dari Malaysia (Lampiran 8). Impor ini biasanya terjadi pada waktu harga dunia tinggi dimana terjadi *rush export* dari Indonesia. Dalam keadaan demikian biasanya pemerintah menggunakan mekanisme pajak ekspor untuk menjamin pasokan dalam negeri yang besarnya pernah mencapai 60%.



Gambar 1. Pola harga CPO

Perkembangan harga minyak sawit (CPO) di pasar domestik dan internasional sejak tahun 1988 sampai dengan 2002 menunjukkan kecenderungan yang menaik (Lampiran 9). Pergerakan harga minyak sawit di pasar internasional ditransmisikan ke pasar domestik (*border price dan whole sale price*) melalui mekanisme pasar. Secara umum pergerakan harga minyak sawit domestik searah dengan perkembangan harga minyak sawit di pasar internasional. Selain itu, harga minyak sawit juga mempunyai fluktuasi musiman (Gambar 1). Dalam semester 1, harga pada bulan Januari biasanya adalah paling tinggi kemudian turun melandai dalam Februari sampai Mei. Dalam semester 2, penurunan harga yang paling tajam terjadi pada Mei-Juli/Agustus dan naik sampai dengan bulan Januari.

## 2. Neraca minyak kelapa sawit (penggunaan domestik)

Hingga saat ini, konsumsi minyak sawit domestik diperkirakan sekitar 50%-60% dari produksi dan penggunaannya sebagian besar untuk pangan (80%-85%) sedangkan untuk industri oleokimia relatif masih kecil (15%-20%). Menurut perkiraan, pertumbuhan konsumsi minyak sawit dalam negeri adalah sekitar 11,5 %/tahun. Pertumbuhan konsumsi untuk oleopangan adalah 12%, lebih besar dibandingkan pertumbuhan konsumsi untuk oleokimia (10%). Dengan perkiraan tersebut, maka neraca minyak kelapa sawit Indonesia dalam lima tahun terakhir bergerak dari surplus ke arah keseimbangan, identik dengan neraca dunia (Lampiran 10).

## 3. Peta perdagangan minyak kelapa sawit

Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor minyak sawit kedua terbesar di dunia setelah Malaysia. Malaysia memegang peranan penting dalam perdagangan minyak sawit pada akhir tahun 1960-an saat Indonesia dan Nigeria mengalami stagnasi produksi. Pada tahun 1969 pangsa ekspor minyak sawit Malaysia mencapai sekitar 43,48 persen dari ekspor minyak sawit dunia dan pada tahun 2002 pangsa ekspor Malaysia tumbuh menjadi 57,28 persen. Pada periode yang sama, pangsa ekspor minyak sawit Indonesia sekitar 20,49 persen, dan 32,64 persen. Sisanya dikuasai oleh beberapa negara, seperti Papua Nugini dan Pantai Gading (Lampiran 11).

Amerika Serikat, Belanda dan Pakistan secara tradisional merupakan negara pengimpor utama minyak sawit. Pada tahun 1969 ketiga negara mengimpor sekitar 11 persen dari impor minyak sawit dunia. Pada tahun 2002, pangsa impor ketiga negara meningkat menjadi sekitar 13,35 persen (Lampiran 12). Perubahan pangsa impor ketiga negara tersebut terjadi karena adanya peningkatan impor oleh Pakistan yang cukup nyata. Saat ini ketiga pengimpor minyak sawit tersebut berperan cukup penting bagi Indonesia.

Pada ketiga pasar tersebut, Malaysia merupakan pesaing utama Indonesia dan umumnya CPO asal Malaysia lebih kompetitif karena antara lain, mutu yang lebih baik dan adanya kemudahan-kemudahan yang didapat Malaysia dari negara pengimpor dan tidak diperoleh Indonesia. Namun, perkembangan ekspor minyak sawit Malaysia diperkirakan akan tertahan oleh adanya keterbatasan sumber daya lahan dan tingginya tingkat upah pekerja. Sedangkan Indonesia masih mempunyai potensi untuk berkembang karena dukungan biaya produksi murah dan lahan potensial yang masih tersedia. Namun Indonesia juga menghadapi kendala dalam pengembangan ekspor karena tingkat konsumsi domestik tinggi. Sementara itu, Malaysia pun tidak berdiam diri dan terus meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya, sehingga mereka mengembangkan dengan sungguh-sungguh industri produk turunan CPO yang bernilai lebih tinggi.

## E. Produksi Negara Pesaing

Berdasarkan data produksi tahun 1999 - 2004, terlihat jelas bahwa Malaysia masih menempati peringkat pertama di dunia untuk produksi CPO. Pada tahun 1999 produksi CPO Malaysia sekitar 10,6 juta ton, sedangkan Indonesia hanya 6 juta ton (56,6 %). Pada tahun 2004 Produksi CPO Malaysia meningkat menjadi 14 juta ton, sedangkan Indonesia sebesar 11,4 juta ton (81,4%). Peningkatan produksi CPO Indonesia lebih besar disebabkan oleh peningkatan luas areal penanaman kelapa sawit. Sedangkan produksi negara lainnya, seperti Colombia, Ivory Coast dan Thailand masih jauh di bawah tingkat produksi Indonesia maupun Malaysia (Lampiran 13).

## F. Penelitian dan Pengembangan

Bagi agribisnis kelapa sawit, lembaga riset/penelitian dan pengembangan berperan sangat strategis dalam mendukung implementasi kebijakan dan program pengembangan demi kelanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Lembaga ini melaksanakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan dalam penanaman, produksi, panen, ekstraksi, pengolahan, penyimpanan, transportasi, pemanfaatan, konsumsi, sosial ekonomi, hukum, dan pemasaran kelapa sawit, dan produk turunannya termasuk produk limbah, yang diemban oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

## G. Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah

Organisasi pengusaha yang berkaitan dengan agribisnis kelapa sawit meliputi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Pengusaha Oleokimia Indonesia (APOLIN) dan Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia (FAMNI). Sedangkan organisasi petani bernaung di bawah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKSI) dan Gabungan Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO). Pada saat ini juga sedang berlangsung pembentukan Dewan Minyak Sawit Indonesia dengan maksud agar minyak sawit dan turunannya dapat sebagai *market leader* di pasar dunia dan salah satu sumber kekuatan ekonomi nasional serta berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kebijakan pemerintah yang menonjol dan sebagian diantaranya spesifik minyak sawit adalah:

1. Kebijakan perdagangan untuk menghambat ekspor, stabilisasi harga minyak goreng dan ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri diterapkan melalui penggunaan instrumen pajak ekspor.
2. Kebijakan perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui penggunaan instrumen pajak penghasilan, pertambahan nilai dan retribusi.

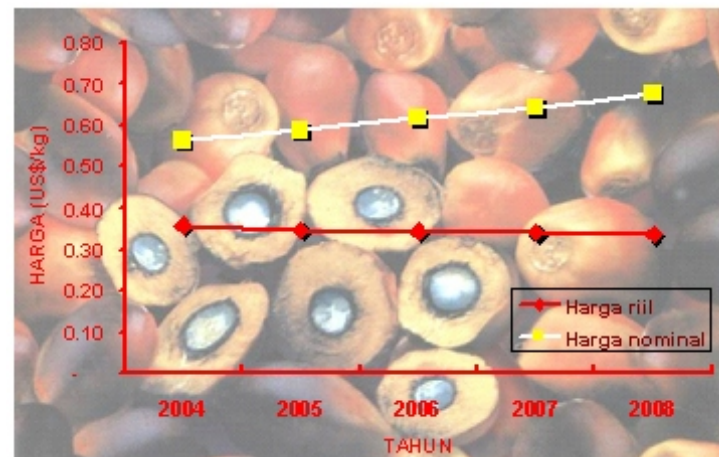
3. Kebijakan yang berkaitan dengan perijinan usaha/ investasi, yaitu adanya integrasi vertikal antara kebun kelapa sawit dengan pengolahan dan integrasi horizontal antara kebun kelapa sawit dengan usaha lain, misal ternak.
4. Pengembangan perkebunan melalui penerapan 5 pola, yaitu:
  - a. Pola koperasi usaha perkebunan (Pola KUP),
  - b. Pola patungan koperasi sebagai mayoritas pemegang saham dan investor sebagai minoritas pemegang saham (Pola Pat K-I),
  - c. Pola patungan investor sebagai mayoritas pemegang saham dan koperasi sebagai minoritas pemegang saham (Pola Pat I-K),
  - d. Pola built, operated, and transferred (Pola BOT), dan (5) Pola bank tabungan negara (Pola BTN).
5. sebagai bagian integral dari subsektor perkebunan, usaha di agribisnis kelapa sawit juga tunduk pada peraturan yang ditetapkan dalam UU No. 18 Tahun 2004 di samping aturan perundang-undangan lainnya.

### III. PROSPEK, POTENSI DAN ARAH PENGEMBANGAN

#### A. Prospek

##### 1. Harga

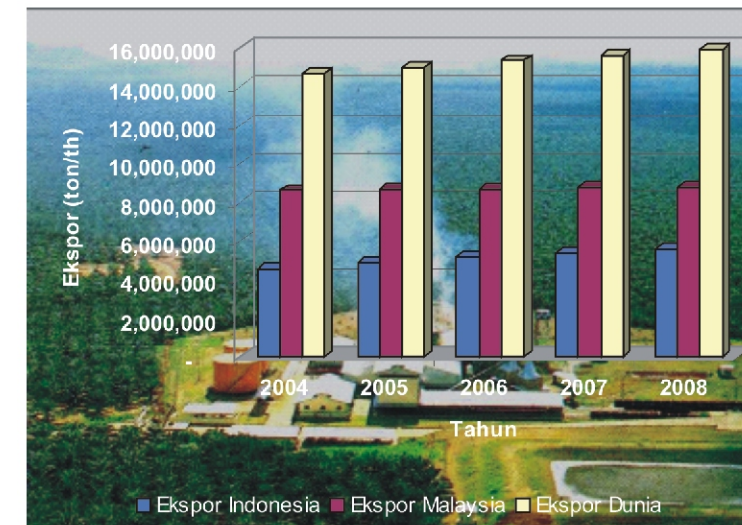
Hingga tahun 2008, harga minyak sawit di pasar Rotterdam diperkirakan akan mengalami kenaikan walaupun secara riil akan mengalami sedikit penurunan karena adanya kenaikan inflasi. Pada tahun 2004, harga minyak sawit di Rotterdam sekitar US\$ 0.56/kg dan pada tahun 2008 mencapai US\$ 0.68/kg (Gambar 2). Kenaikan harga ini diperkirakan tidak terlepas dari berkembangnya pasar minyak sawit, terutama di negara-negara berkembang. Dengan kata lain, minyak sawit masih mempunyai prospek ke depan.



Gambar 2. Harga riil dan nominal CPO di Rotterdam (US\$/kg)

#### 2. Ekspor

Meskipun hingga tahun 2008 ekspor CPO Indonesia meningkat dengan laju 5,22% per tahun, Malaysia masih tetap unggul dibandingkan Indonesia. Ekspor Indonesia dan Malaysia pada tahun 2004 masing-masing 4,57 juta dan 5,6 juta ton menjadi 5,61 juta dan 8,78 juta ton pada tahun 2008 (Gambar 3). Dalam periode tersebut, Indonesia akan menguasai 33,32%, sedangkan Malaysia menguasai 56,90% dari total ekspor dunia.



Gambar 3. Ekspor minyak sawit Indonesia, Malaysia dan dunia (ton)

Gambar di atas juga mengisyaratkan bahwa hanya dengan pertumbuhan minimal 17,69% per tahun, ekspor Indonesia baru dapat menyamai ekspor Malaysia. Pertumbuhan tersebut dapat dicapai jika Indonesia mengalami peningkatan produktivitas menjadi rata-rata sekitar 5,51 ton CPO/ha/tahun hingga tahun 2008. Dengan kondisi pertanaman yang ada, Indonesia masih memiliki kemungkinan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi.

### 3. Pengembangan produk

Pengembangan produk kelapa sawit diperoleh dari produk utama, yaitu minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit, serta produk sampingan yang berasal dari limbah. Beberapa produk yang dihasilkan dari pengembangan minyak sawit diantaranya adalah minyak goreng, produk-produk oleokimia, seperti *fatty acid*, *fatty alkohol*, *glycerine*, *metalic soap*, *stearic acid*, *methyl ester*, dan *stearin*. Perkembangan industri oleokimia dasar merangsang pertumbuhan industri barang konsumen seperti deterjen, sabun, dan kosmetika.

Sedangkan produk-produk yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah diantaranya adalah pupuk organik, kompos, dan kalium serta serat yang berasal dari tandan kosong kelapa sawit, arang aktif dari tempurung buah, pulp kertas yang berasal dari batang dan tandan sawit, perabot dan papan partikel dari batang, dan pakan ternak dari batang dan pelepah, serta pupuk organik dari limbah cair dari proses produksi minyak sawit.

#### B. Potensi

##### 1. Kesesuaian dan ketersediaan lahan

Pengembangan tanaman kelapa sawit telah dilakukan secara luas di Indonesia baik di kawasan barat maupun di kawasan timur Indonesia. Potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan kelapa sawit umumnya cukup bervariasi, yaitu lahan berpotensi tinggi, lahan berpotensi sedang, dan lahan yang berpotensi rendah (Lampiran 14).

Lahan berpotensi tinggi adalah lahan yang memiliki Kelas Kesesuaian Lahan (KKL) untuk kelapa sawit tergolong sesuai (>75%) dan sesuai bersyarat (<25%). Lahan berpotensi sedang memiliki KKL tergolong sesuai (25-50%) dan sesuai bersyarat (50-75%), sementara lahan berpotensi rendah memiliki KKL tergolong sesuai bersyarat (50-75%) dan tidak sesuai (25-50%). Penyebaran areal yang berpotensi untuk pengembangan kelapa sawit tersebut umumnya terdapat di propinsi NAD (454.468 ha), Sumatera Utara (285.652 ha), Sumatera Barat (47.796 ha), Riau (1.557.863 ha), Jambi (511.433 ha), Sumatera Selatan (1.350.275 ha), Kalimantan Barat (1.252.371 ha), Kalimantan Tengah (1.401.236 ha), Kalimantan Timur (2.830.015 ha),

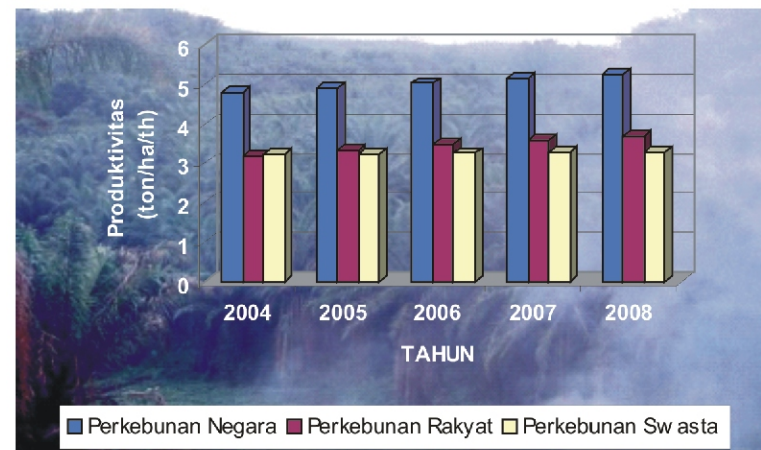
Kalimantan Selatan (965.544 ha), Papua (1.511.276 ha), dan Sulawesi Tengah (215.728 ha).

Pada saat ini areal berpotensi tinggi sudah terbatas ketersediaannya, dan areal yang masih cukup tersedia dan berpeluang untuk dikembangkan adalah yang berpotensi sedang - rendah. Areal berpotensi rendah - sedang tersebut memiliki faktor pembatas untuk pengembangan kelapa sawit yang meliputi:

- a. Faktor iklim yaitu jumlah bulan kering yang berkisar 2-3 bulan/tahun yang menggambarkan penyebaran curah hujan yang tidak merata dalam setahun.
- b. Topografi areal yang berbukit-bergunung dengan kelerengan 25 - 40% (areal dengan kemiringan lereng di atas 40% tidak disarankan untuk pengembangan tanaman kelapa sawit).
- c. Kedalaman efektif tanah yang dangkal, terutama pada daerah dengan jenis tanah yang memiliki kandungan batuan yang tinggi dan kondisi drainase kurang baik.
- d. Lahan gambut.  
Drainase yang jelek pada dataran pasang surut, dataran aluvium, dan lahan gambut.
- e. Potensi tanah sulfat masam pada daerah dataran pasang surut.

##### 2. Produktivitas

Produktivitas PBN, PR dan PBS hingga tahun 2008 ke depan masing-masing meningkat dari 4,79, 3,18 dan 3,21 ton CPO/ha/tahun tahun 2004 menjadi 5,23, 3,69 dan 3,28 ton CPO/ha/tahun (Gambar 4). Artinya, produktivitas PR diproyeksikan akan mengalami peningkatan terbesar diikuti dengan PBN. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat produktivitas ketiga jenis perkebunan di atas masih berada dibawah potensi produktivitas 8 ton CPO/ha/tahun, dan produktivitas yang dicapai perkebunan kelapa sawit Malaysia, yaitu antara 6-7 ton CPO/ha/tahun.



Gambar 4. Produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia (ton CPO/ha/tahun)

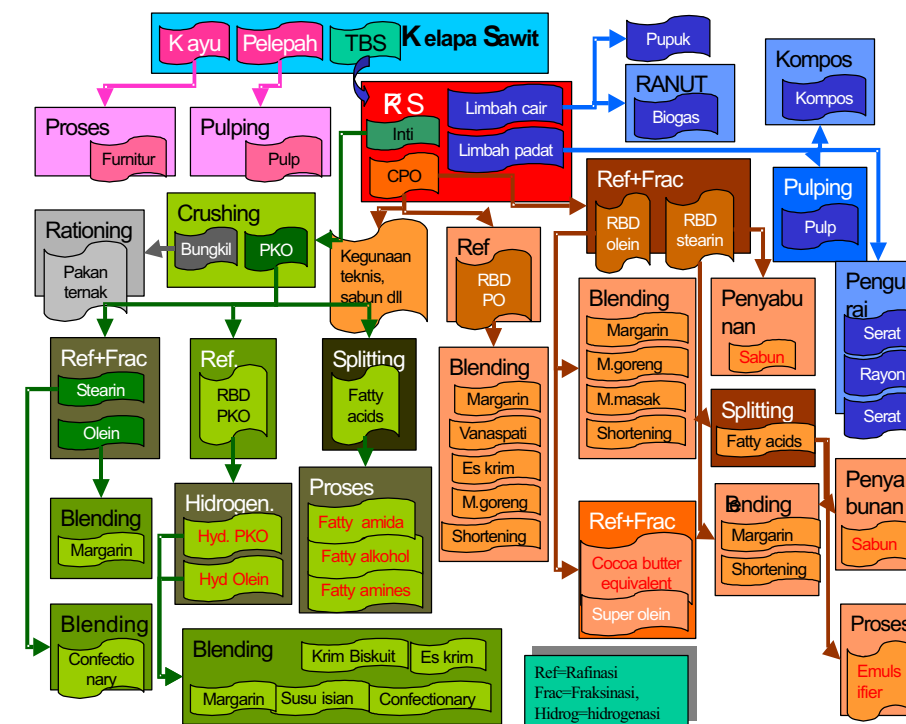
Hal ini mengisyaratkan bahwa peluang untuk meningkatkan produktivitas kebun berbagai jenis perusahaan masih ada, sehingga gerakan peningkatan produktivitas nasional harus menjadi tema penting dalam pengembangan kelapa sawit ke depan. Penggunaan bibit unggul dalam penanaman baru, dan peningkatan intensitas pemeliharaan menjadi kunci sukses program peningkatan produktivitas.

### 3. Pengembangan industri

Produk-produk yang dapat dihasilkan dari minyak sawit sangat luas dengan intensitas modal dan teknologi yang bervariasi (Lampiran 15). Produksi CPO Indonesia yang diolah di dalam negeri sebagian besar masih dalam bentuk produk antara seperti RBD *palm oil*, *stearin* dan *olein*, yang nilai tambahnya tidak begitu besar dan baru sebagian kecil yang diolah menjadi produk-produk oleokimia dengan nilai tambah yang cukup tinggi (Gambar 5).

#### a. Industri minyak makan

Industri fraksinasi/rafinasi menghasilkan nilai tambah yang relatif kecil tetapi kapasitas terpasang industri ini sudah terlalu besar. Di sisi lain, tahapan fraksinasi/rafinasi harus dilakukan dalam industri minyak makan. Nilai tambah yang diperoleh dari perdagangan eceran (*retail*) minyak makan cukup besar. Oleh karena itu pengembangan industri ini perlu diarahkan kepada usaha *retail* minyak makan baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk pasar luar negeri. Untuk itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang terpadu dalam pengembangan minyak goreng/makan (*edible oil*).



Gambar 5. Pohon industri kelapa sawit

### b. Industri oleokimia

Industri oleokimia dasar masih relatif kecil padahal nilai tambahnya cukup besar. Penggunaan minyak/lemak dalam industri oleokimia dunia hanya sekitar 6% dari total produksi minyak/lemak dunia. Namun, industri oleokimia berkembang dengan sangat pesat terutama di Malaysia. Produksi oleokimia dasar dalam 1970-1995 meningkat dari 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton dan diperkirakan menjadi 6 juta ton pada 2000. Produksi Malaysia pada tahun 1995 adalah 1,792 juta ton sedangkan Indonesia baru 652 ribu ton/tahun.

Segmen pasar oleokimia akan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi oleokimia dan kesadaran masyarakat akan lingkungan serta semakin langkanya petrokimia. Teknologi untuk membuat berbagai produk oleokimia sudah ditemukan tetapi belum layak dikembangkan karena belum adanya insentif untuk produk-produk yang ramah lingkungan.

### C. Arah Pengembangan

Dengan potensi dan kemungkinan pengembangannya, maka pengembangan agribisnis kelapa sawit ke depan mengarah pada pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan melalui pemberdayaan di hulu, dan penguatan di hilir. Pengembangan agribisnis kelapa sawit ke depan tidak terlepas dari:

1. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis kelapa sawit.
2. Mendorong pengembangan pasar modal yang memungkinkan petani sebagai pemegang saham perusahaan.
3. Pengembangan inovasi teknologi dan kelembagaan.
4. Pengembangan keseimbangan perdagangan domestik dan internasional.
5. Pengembangan investasi kebun lengkap dengan pengolahan minyak sawit.
6. Mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit.

Dalam kaitan dengan pengembangan wilayah, pengembangan agribisnis kelapa sawit ke depan tetap berorientasi di sentra-sentra produksi kelapa sawit saat ini, yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pemerintah menargetkan peningkatan luas areal kelapa sawit dari tahun 2005 hingga 2010 sebesar 350.000-400.000 ha/tahun. Hal ini didasarkan atas potensi produksi benih nasional dan ketersediaan lahan untuk pengembangan komoditas ini.

## IV. TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan

Tujuan utama pembangunan pertanian adalah:

1. Menumbuhkembangkan usaha pertanian di pedesaan yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
2. Menumbuhkan industri hulu, hilir, dan penunjang dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian,
3. Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal melalui pemanfaatan teknologi yang tepat sehingga kapasitas sumberdaya pertanian dapat dilestarikan dan ditingkatkan,
4. Membangun kelembagaan pertanian yang kokoh dan mandiri dan
5. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam pemasukan devisa.

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian di atas, maka tujuan pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah:

1. Menumbuhkembangkan usaha kelapa sawit di pedesaan yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
2. Menumbuhkan industri pengolahan CPO dan produk turunannya dan industri penunjang (pupuk, obat-obatan dan alsin) dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah CPO dan produk turunannya,
3. Memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk tanaman kelapa sawit secara optimal melalui pemanfaatan teknologi yang tepat sehingga kapasitas sumberdaya pertanian dapat dilestarikan dan ditingkatkan,
4. Membangun kelembagaan perkelapasawitan yang kokoh dan mandiri dan,

5. Meningkatkan kontribusi CPO dan produk turunannya dalam pemasukan devisa dari subsektor perkebunan.

### B. Sasaran

Agar tujuan di atas dapat tercapai, maka sasaran pengembangan agribisnis kelapa sawit dikelompokkan dalam jangka panjang dan jangka menengah. Sasaran umum Jangka Panjang dari pengembangan agribisnis kelapa sawit Tahun 2025 adalah:

1. Produktivitas rata-rata kelapa sawit 20 ton TBS/ha,
2. Pendapatan petani antara US\$ 2.000 - 2.500/KK/tahun, dimana pendapatan ini terkait dengan harga yang diterima petani yaitu minimal 80% dari harga FOB dan petani mempunyai saham di unit pengolahan,
3. Produksi kelapa sawit Indonesia 23 juta ton, dan alokasi untuk konsumsi dalam negeri mencapai 12 juta ton,
4. Sistem distribusi dan transportasi produk CPO yang efisien,
5. Sistem produksi *zero waste product/green product* diterapkan secara kontinyu dan konsisten,
6. Terjaminnya investasi di bidang kelapa sawit yang didukung oleh dana khusus (*cess*) pengembangan kelapa sawit, dan
7. Industri hilir CPO, khususnya oleokimia dan biodiesel berkembang.

Sedangkan sasaran khusus Jangka Menengah pengembangan agribisnis kelapa sawit pada tahun 2010 adalah:

1. Bibit kelapa sawit tersedia secara cukup dan mudah terjangkau dan tidak adanya bibit kelapa sawit palsu,
2. Produktivitas rata-rata kelapa sawit meningkat menjadi 15 ton TBS/ha,
3. Produksi kelapa sawit Indonesia akan mencapai 15,3 juta ton, dan alokasi untuk konsumsi dalam negeri mencapai 6 juta ton. Peningkatan produksi tersebut diantaranya berasal dari perluasan sekitar 50.000-60.000 ha.

